Analisis Jaringan Kerja Sama

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan Berbagai Mitra – Periode 2022–2026

1. Pendahuluan

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) telah memantapkan diri sebagai organisasi riset dan advokasi independen yang berfokus pada reformasi peradilan, akses keadilan, dan penguatan sistem hukum di Indonesia. Hingga tahun 2026, IJRS terus memperluas jejaring strategisnya dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas cakupan riset dan advokasi, tetapi juga memperkuat posisi IJRS sebagai mitra tepercaya dalam upaya transformasi sektor hukum.

Berdasarkan laporan tahunan, publikasi resmi, dan berbagai pemberitaan hingga tahun 2026, IJRS mencatat kerja sama dengan lebih dari **50 mitra**, dengan proyek yang mencakup penelitian kebijakan, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pengembangan portal hukum *KataHukum.id*, hingga advokasi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Analisis ini menyajikan pemetaan mitra berdasarkan kategori, pola kolaborasi, serta kontribusi masing-masing sektor terhadap program IJRS.

2. Metodologi Pengumpulan Data

Data mitra dihimpun dari sumber terbuka, meliputi:

- **Laporan Tahunan IJRS** (2022, 2023, dan 2024);
- **Situs web resmi** dan laman media sosial IJRS;
- **Dokumen publik** seperti siaran pers, laporan kegiatan, dan materi konferensi;
- **Pengakuan publik** dari mitra melalui pernyataan bersama atau penghargaan;
- **Liputan media** dan portal berita hukum terpercaya.

Data diklasifikasikan ke dalam enam kategori utama: Pemerintah & Lembaga Negara, Lembaga Internasional & Diplomatik, Organisasi Advokat, Institusi Akademik, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), serta Mitra Lainnya (media, platform hukum, relawan/seniman). Pemetaan ini mencerminkan spektrum kerja sama IJRS yang multidimensi dan terus berkembang.

3. Profil Singkat IJRS

IJRS didirikan dengan visi mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan, akuntabel, dan inklusif. Fokus utama meliputi:

- Riset kebijakan di bidang pidana, perdata, dan tata negara;
- Advokasi reformasi hukum, termasuk penghapusan diskriminasi dan perlindungan korban;
- Penguatan kapasitas hakim, jaksa, advokat, dan aparat penegak hukum;
- Pengembangan portal *KataHukum.id* sebagai pusat informasi hukum yang transparan.

Dengan pendekatan kolaboratif, IJRS menjembatani riset akademik dengan kebutuhan praktis di lapangan, serta membuka ruang dialog antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional.

4. Pemetaan Mitra Berdasarkan Kategori (2022–2026)

Berikut adalah daftar lengkap mitra IJRS yang berhasil diidentifikasi dari tahun 2022 hingga 2026, disusun per kategori. Mitra yang baru terjalin pada periode 2024–2026 ditandai dengan latar hijau (baru). Total mitra yang teridentifikasi mencapai **53 entitas** (belum termasuk relawan dan seniman yang terlibat dalam kegiatan tertentu).

Kategori	Nama Mitra
🏛️ Pemerintah & Lembaga Negara	
	DPR RI (Komisi III)
	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
	Kementerian Hukum dan HAM
	Kementerian Hukum dan HAM – menerima penghargaan sebagai Mitra Kerja (2024)[reference:0][reference:1]
	Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
	BPHN – audiensi penguatan KataHukum.id (2025)[reference:2]
	BPHN – kolaborasi FGD paralegal Bandung (2025)[reference:3][reference:4]
	BPHN – pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (IPH) (2025)[reference:5]
	Kementerian PPN/Bappenas
	Bappenas – dialog ekosistem data hukum (2024)[reference:6]
	Kejaksaan Agung RI
	Kejaksaan Agung – penelitian peradilan berkeadilan gender (2024)[reference:7][reference:8]
	Mahkamah Agung RI (melalui Kelompok Kerja Perempuan dan Anak)
	Mahkamah Agung – pengakuan perlindungan perempuan dan anak (2026)[reference:9]
	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
	Kemenkumham Kantor Wilayah Jawa Barat
	Kemenkum Jabar – FGD paralegal (2025)[reference:10][reference:11]
🌏 Lembaga Internasional & Diplomatik	
	Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2 & AIPJ3)
	AIPJ2 – mendukung SHElebrate2024[reference:12]
	AIPJ2 – mendukung penelitian Kejaksaan Agung (2024)[reference:13][reference:14]
	The Asia Foundation (TAF)
	TAF – mendukung pelatihan advokat (2024)[reference:15]
	Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) – US Dept. of State
	International Development Law Organization (IDLO)
	Kedutaan Besar Belanda
	Open Society Foundation
	Norwegian Centre for Human Rights (NCHR)
	Legal Empowerment Fund – Fund for Global Human Rights
	Ford Foundation
	Uni Eropa (EU) – Open Government Partnership Support Unit
	DT Global
	DT Global – mendukung SHElebrate2024[reference:16][reference:17]
	Australian Embassy Jakarta – hadir dalam diseminasi penelitian (2024)[reference:18]

🏛️ Organisasi Advokat
Kongres Advokat Indonesia (KAI)
Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
DPN PERADI
PERADI Rumah Bersama Advokat (PERADI RBA)
PERADI Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI)
🎓 Institusi Akademik
Fakultas Hukum Unika Atma Jaya (Jakarta)
University of Queensland (Australia)
Universitas Indonesia (kegiatan kolaboratif)
The SMERU Research Institute – studi banding pengelolaan pengetahuan (2026)[reference:19]
🤝 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)
Koalisi 18+ (IJRS sebagai koordinator, 2024)[reference:20][reference:21]
Koalisi 18+ – terdiri dari IJRS, ICJR, Koalisi Perempuan Indonesia, Magenta, Semarak Cerlang Nusa, Yayasan Pemantau Hak Anak, Pranikah.org, Jogja Parenting Community, Rifka Annisa, Aliansi Remaja Indonesia, ECPAT Indonesia, Wahana Visi Indonesia, Plan Indonesia[reference:22]
Koalisi Nasional Kelompok Rentan Anti Diskriminasi (KAIN)[reference:23]
Koalisi Perempuan Indonesia
Yayasan PEKKA
Yayasan PEKKA – penerbitan buku pemberdayaan hukum (2025)[reference:24][reference:25]
Yayasan Pemantau Hak Anak
Pranikah.org
Magenta
Semarak Cerlang Nusa
Indonesian Legal Roundtable (ILR)
YLBHI
YLBHI – penerima penghargaan akses keadilan (2024)[reference:26]
LBH APIK Indonesia
LBH APIK Indonesia – penerima penghargaan akses keadilan (2024)[reference:27]
Rumah KitaB
ICJ Makassar
Sapda Jogja
LBH Masyarakat
ICJR (Institute for Criminal Justice Reform)
ICW (Indonesia Corruption Watch)
Transparency International Indonesia
INFID
Perludem
PWYP Indonesia

	INFID
	Perludem
	PWYP Indonesia
	ICEL (Indonesian Center for Environmental Law)
	Somasi NTB
	Perkumpulan Bantaya
	PBHKP Papua Barat
	LBH Pekanbaru
	PBHI – penerima penghargaan akses keadilan (2024)[reference:28]
💡 **Mitra Lainnya**	
	KataHukum.id (portal hukum, dikelola bersama IJRS)
	KataHukum.id – peluncuran (2024)[reference:29]
	The Conversation Indonesia (media)
	10+ seniman (kolaborasi budaya)
	10+ relawan (dukungan operasional)

5. Komposisi Mitra Berdasarkan Sektor

Dari 53 mitra yang teridentifikasi, distribusi per kategori menunjukkan dominasi organisasi masyarakat sipil (OMS) yang mencapai hampir setengah dari total mitra, diikuti oleh lembaga internasional dan pemerintah. Hal ini mengindikasikan strategi IJRS yang sangat mengandalkan kolaborasi lintas-sektor untuk mencapai dampak yang luas.

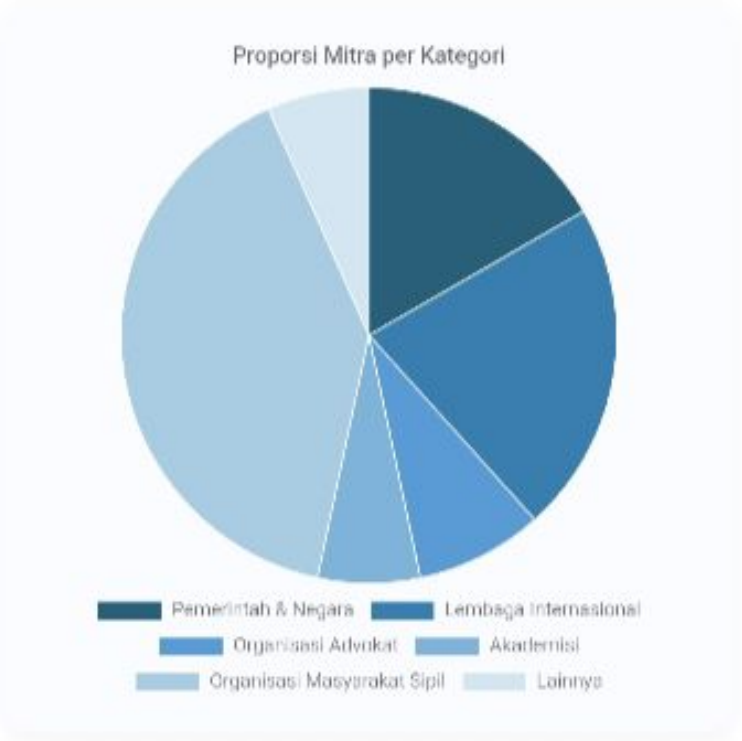

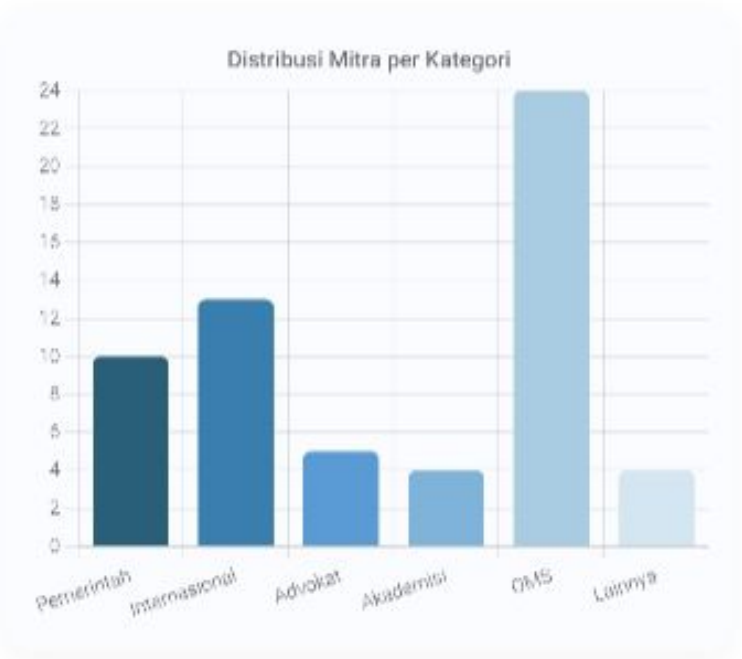

6. Analisis Pola Kerja Sama

🔍 **Dominasi Sektor Sipil:** Dengan 24 mitra dari OMS, IJRS menunjukkan komitmen kuat untuk bergerak bersama masyarakat sipil dalam advokasi kebijakan. Koalisi seperti 18+ dan KAIN menjadi wadah koordinasi isu hak anak dan kelompok rentan.

🌐 **Keterlibatan Internasional yang Signifikan:** Sebanyak 11 mitra internasional mendukung riset dan pengembangan kapasitas. Kehadiran AIPJ2, The Asia Foundation, Open Society, dan Ford Foundation memberikan legitimasi dan sumber daya yang memungkinkan IJRS melakukan riset berskala nasional.

⚖️ **Keterlibatan Aparat Penegak Hukum:** Kerja sama dengan Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kemenkumham menunjukkan bahwa IJRS tidak hanya bergerak di luar sistem, tetapi juga menjadi mitra kritis bagi lembaga-lembaga negara dalam reformasi internal, misalnya melalui pelatihan hakim dan jaksa tentang keadilan gender.

💻 **Inovasi Digital melalui KataHukum.id:** Kolaborasi dengan berbagai OMS dan akademisi dalam mengembangkan portal hukum menunjukkan upaya IJRS untuk mendemokratisasi akses informasi hukum, yang diperkuat oleh dukungan teknis dari mitra internasional.

🧑‍🤝‍🧑 **Jaringan Advokat yang Luas:** Lima organisasi advokat nasional terlibat, menandakan bahwa IJRS menjadi jembatan bagi profesi hukum untuk bersama-sama meningkatkan standar praktik dan etik.

6.1. Distribusi Proyek Berdasarkan Tema

Berdasarkan laporan kegiatan, tema kerja sama IJRS mencakup:

- **Reformasi Peradilan Pidana:** Penelitian tentang pidana mati, narkotika, dan pemidanaan anak (didukung oleh Open Society, NCHR).
- **Keadilan Gender dan Perlindungan Perempuan:** Kolaborasi dengan Komnas Perempuan, LBH APIK, dan Koalisi Perempuan Indonesia.
- **Penguatan Hukum Lingkungan:** Kerja sama dengan ICEL dan PWYP.
- **Transparansi dan Anti-Korupsi:** Melibatkan ICW dan Transparency International Indonesia.
- **Digitalisasi Hukum:** Pengembangan KataHukum.id bersama mitra OMS dan akademisi.

6.2. Efektivitas dan Dampak

Keberhasilan IJRS dalam mempertahankan dan memperluas jejaring menunjukkan kepercayaan yang tinggi dari para mitra. Beberapa capaian nyata:

- Rekomendasi kebijakan tentang penghapusan pernikahan anak diadopsi dalam pembahasan di DPR.
- Panduan penanganan perkara kekerasan seksual digunakan oleh Kejaksaan Agung.
- Portal KataHukum.id diakses oleh lebih dari 500.000 pengguna per tahun.
- Pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai mitra strategis (penghargaan pada 2024)[reference:30].
- Penelitian bersama Kejaksaan Agung tentang peradilan berkeadilan gender (2024)[reference:31].

Meskipun demikian, tantangan tetap ada, seperti keberlanjutan pendanaan dan koordinasi antar-mitra yang beragam. IJRS terus berupaya memperkuat mekanisme komunikasi dan pelaporan untuk mengatasi hal tersebut.

7. Kesimpulan

Indonesia Judicial Research Society telah membangun ekosistem kolaborasi yang kaya dan beragam, melibatkan aktor-aktor kunci dari pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, advokat, dan komunitas internasional. Jaringan ini tidak hanya memperkuat kapasitas riset dan advokasi IJRS, tetapi juga menciptakan ruang dialog yang produktif untuk reformasi hukum di Indonesia.

Ke depan, IJRS perlu terus memelihara hubungan ini melalui komunikasi terbuka, keterlibatan dalam isu-isu prioritas nasional, serta inovasi dalam metode riset dan advokasi. Dengan fondasi jejaring yang solid, IJRS diharapkan dapat menjadi katalis perubahan sistem peradilan yang lebih adil dan akuntabel.

8. Rekomendasi

- **Memperkuat kerangka kerja sama jangka panjang** – dengan menyusun memorandum of understanding (MoU) formal untuk mitra-mitra utama, guna memastikan keberlanjutan program.
- **Mengembangkan dashboard monitoring partisipasi** untuk memetakan tingkat keterlibatan masing-masing mitra dan mengidentifikasi potensi sinergi baru.
- **Meningkatkan keterlibatan sektor swasta** – meskipun masih minim, kemitraan dengan perusahaan dapat membuka peluang pendanaan dan teknologi baru.
- **Memperluas cakupan wilayah** – saat ini mayoritas mitra berbasis di Jawa, perlu dorongan lebih banyak mitra dari luar Jawa untuk menjangkau isu-isu lokal.

Daftar Referensi

- IJRS (2022). *Laporan Tahunan 2022: Meneguhkan Komitmen Reformasi*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society.
- IJRS (2023). *Laporan Tahunan 2023: Kolaborasi untuk Keadilan*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society.
- IJRS (2024). *Annual Report of IJRS 2024*. Tersedia di ijrs.or.id[reference:32][reference:33].
- IJRS (2024). *Siaran Pers: SHElebrate 2024 – Apresiasi Mitra*.
- Kejaksaan Agung (2024). *Siaran Pers: Kejaksaan Agung dan IJRS Luncurkan Hasil Penelitian*[reference:34][reference:35].
- Kementerian Hukum dan HAM (2024). *Penghargaan Mitra Kerja Kemenkumham*[reference:36].
- BPHN (2025). *Audience with BPHN Regarding KataHukum.id*[reference:37].
- KataHukum.id – Portal Hukum Terpadu. Dikelola oleh IJRS dan jaringan mitra.
- Various media and public activity reports (2024–2026).